



RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2023



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Jalan Urip Sumoharjo No. 269 Makassar

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
DAFTAR ISI	ii
KATA PENGANTAR	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	4
1.3. Maksud dan Tujuan	6
1.4. Sistematika Penulisan	7
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU	10
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	10
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	25
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi	28
2.4. Review Terhadap Rancangan Akhir RKPD	29
2.5. Penelaan Usulan Program, Kegiatan dan Sun Kegiatan Masyarakat	42
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	43
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	43
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	43
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	45
BAB V PENUTUP	57

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahNya, Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 dapat diselesaikan dengan baik.

Penyusunan rencana kerja ini sebagai acuan atas perencanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Tahun 2023 sebagai tindak lanjut program yang tersusun dalam Perubahan Rencana Strategis 2018 - 2023 dan RKPD Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan ini masih belum sempurna sehingga kritik, saran dan masukan yang konstruktif dari semua pihak sangat kami harapkan guna kesempurnaan dalam penyusunan Rencana Kerja ditahun yang akan datang.

Akhirnya kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu.

Makassar, Juli 2022

PIL. KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI SULAWESI SELATAN,



ANDI RIJAYA, S.STP
Pangkat Pembina Tk.I
NIP. 19751114 199511 1 001

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2023 ini merupakan rencana kerja tahunan yang disusun berdasarkan masa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023.

Rencana Kerja ini juga merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023, sehingga Visi dan Misi Sulawesi Selatan serta target dan Sasaran Pembangunan yang dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2023 merupakan dokumen rencana operasional pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun 2023, guna mendukung pencapaian arah, tujuan, sasaran dan target prioritas rencana pembangunan jangka pendek tahun 2023.


Dalam rangka menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan tersebut sebagai upaya dalam mendukung capaian indikator kinerja maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Seluruh aparatur Satuan Polisi Pamong Praja berkewajiban untuk melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam Rencana Kerja 2023 dengan efektif dan efisien;
2. Rencana Kerja Tahun 2023 sebagai langkah awal dalam penyusunan Anggaran Tahun 2023 dimana Rencana Kerja di jabarkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran;
3. Untuk menjamin konsistensi, sinergitas, harmonisasi, integritas dan efisiensi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja seluruh aparatur secara berjenjang wajib melaksanakan pengawasan dan pengendalian;
4. Rencana Kerja Tahun 2023 mengacu pada Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tata cara penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Rencana Kerja Tahun 2023 berlaku sejak tanggal ditetapkan, adapun langkah-langkah persiapan dimulai sejak tanggal ditetapkan hingga pelaksanaannya perlu terus dilakukan dengan memperhatikan penerapan prinsip-prinsip koordinasi, sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi dan efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Demikian Dokumen Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 disusun dan dijadikan pedoman dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada tahun 2023.

Makassar, Juli 2022

PIL. KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI SULAWESI SELATAN,


ANDI RIJAYA, S.STP
Pangkat Pembina Tk.I
NIP. 19751114 199511 1 001

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah mengamanatkan penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah yaitu RPJPD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah), RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) dan RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan penyusunan Dokumen Rencana Perangkat Daerah, dalam hal ini penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah adalah rencana strategis perangkat daerah periode 5 tahunan yang memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan Pemerintahan Wajib dan/atau urusan Pemerintahan Pilihan sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif; sedangkan Renja Perangkat Daerah adalah rencana kerja perangkat daerah periode 1 tahun yang memuat program, kegiatan, sub keegiatan, lokasi dan kelompok sasaran disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah).

Rencana Kerja Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan disusun berdasarkan pedoman yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Renja Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan. Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) dan tetap memperhatikan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga. Renja Perangkat Daerah ini menjadi acuan bagi Kabupaten/Kota dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah tingkat Kabupaten/Kota.

Renja Perangkat Daerah ini akan menjadi acuan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Periode 2018 - 2023.

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan dilaksanakan dalam rangka mencapai 2 misi Gubernur, yaitu Misi Pertama 'Pemerintahan yang Berorientasi Melayani dan Inovatif' dan Misi Keempat 'Pembangunan manusia yang kompetitif dan inklusif'.

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan merupakan organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat sesuai Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 50 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Untuk itu, agar pelaksanaan tugas yang diberikan berjalan efektif dan terarah maka penyusunan dan penetapan Rencana Kerja OPD menjadi mutlak sebagai pedoman di lingkungan OPD dalam menyusun program dan kegiatan prioritas pada tahun berjalan.

Dalam rangka mendukung terwujudnya *good governance*, sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan mewujudkan pemerintahan yang berorientasi pada hasil (*result oriented government*), yaitu pemerintah lebih focus pada pencapaian kinerja yang lebih baik.

Proses penyusunan rancangan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal Rencana kerja Perangkat Daerah (RKPD). Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja Kerja (Renja) Perangkat Daerah dapat dikerjakan secara simultan atau paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Perangkat Daerah, evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (renja) Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Perangkat Daerah.

Selanjutnya tahapan penetapan rancangan akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah dilakukan dengan pengesahan oleh Kepala Daerah, dan Kepala OPD menetapkan Renja Perangkat Daerah untuk menjadi pedoman di lingkungan OPD yang digunakan dalam menyusun program dan kegiatan prioritas OPD pada tahun anggaran berjalan.

Dimana prinsip penyusunan Rencana Kerja (Renja) antara lain :

1. Substansi Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan perbaikan dari materi Rancangan Renja Perangkat Daerah yang disesuaikan dengan Perkada RKPD;
2. Program dan Kegiatan dirinci berdasarkan sumber dana yang diusulkan;
3. Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolok ukur kinerja keluaran, target capaian program/kegiatan, target keluaran kegiatan, total dana yang diperlukan kegiatan.
4. Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah merupakan dokumen resmi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam tahun rencana dan merupakan acuan dalam penyusunan RKA OPD setelah memerhatikan nota kesepakatan kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).



Gambar : Bagan Alur Tahapan Renja PD

Adapun persiapan penyusunan Renja dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :

- a. Persiapan penyusunan Renja
 - Pembentukan Tim Penyusun Renja;
 - Orientasi mengenai Renja;
 - Penyusunan Agenda Kerja Tim Kerja;
 - Pengumpulan data dan informasi.
- b. Pengelolah Data dan informasi

Tahap pengolahan data dan informasi bertujuan untuk menyajikan seluruh kebutuhan data dari laporan hasil analisis menjadi informasi yang lebih terstruktur, sistematis, dan relevan bagi pembahasan tim dan pihak-pihak terkait di tiap tahap perumusan penyusunan rancangan Renja.
- c. Tahap perumusan Rancangan Renja
 - Pengolahan data dan informasi;
 - Analisis gambaran pelayanan OPD;
 - Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu berdasarkan Renstra Perangkat Daerah;
 - Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD;
 - Telaahan terhadap rancangan awa RKPDP;
 - Perumusan tujuan dan sasaran;
 - Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat;
 - Perumusan kegiatan prioritas;
 - Penyajian awal dokumen rancangan Renja Perangkat Daerah;
 - Penyempurnaan rancangan rencana kerja Perangkat Daerah;
 - Pembahasan Forum Perangkat Daerah;
 - Penyesuaian dokumen rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun rencana dengan mempertimbangkan arah dan kebijakan umum pembangunan daerah;

- Penyajian dan penyampaian rancangan Rencana Kerja;
- Verifikasi dan penyempurnaan rancangan Rencana Kerja yang mengacu pada rancangan akhir RKPD;
- Penetapan Renja Perangkat Daerah.

Rencana Kerja (Renja) sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahunan dilingkup OPD merupakan penjabaran dari Renstra Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan jangka waktu lima tahunan. Seluruh dokumen tersebut merupakan bagian dari system perencanaan pembangunan dari proses yang sistematis dan terpadu, maka seluruh tahapan-tahapan dan dokumen yang dihasilkan harus menunjukkan keterkaitan yang erta antara satu dengan lainnya.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 adalah :

- 1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 3) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- 5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);

- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
- 11) Peraturan Menteri Dalam Negeri 26 Tahun 2005 tentang Pedoman Prosedur Tetap Operasional Satuan Polisi Pamong Praja;
- 12) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaporan Satuan Polisi Pamong Praja;
- 13) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 315);
- 14) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 15) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 16) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pemenuhan Hak Pengawai Negeri Sipil, Penyediaan Sarana dan Prasarana Minimal, Pembinaan Teknis Operasional dan Penghargaan Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 550);
- 17) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 1447)
- 18) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 548);

- 19) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 7 Noreg Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan : (7/2015, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 283);
- 20) Peraturan Daerah Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 1);
- 21) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 293) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 309);
- 22) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019, Nomor 1);
- 23) Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 50 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 Nomor 50);
- 24) Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 30 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 30);
- 25) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

1.3 Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Maksud Penyusunan Rencana Kerja adalah untuk memenuhi regulasi kebijakan yang berkembang, perencanaan yang menjadi rujukan, isu strategis dan sebagai instrument perencanaan dan penganggaran periodik berfungsi sebagai berikut:

- a. Sebagai acuan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Satuan Polisi Pamong Praja untuk mengaplikasikan perencanaan pembangunan selama 1 (satu) tahun anggaran;
- b. Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan sesuai dengan tupoksi OPD;
- c. Menjadi tolok ukur penilaian kinerja serta sebagai perangkat untuk mencapai harmonisasi perencanaan bagi OPD.

2. Tujuan

Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan adalah :

- a. Sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2023 dalam melaksanakan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan;
- b. Perwujudan efisiensi dan efektifitas dalam alokasi sumber daya berdasarkan pertimbangan pagu indikatif dan skala prioritas;
- c. Terwujudnya integritas, sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan program dan kegiatan;
- d. Menjadi tolok ukur kinerja bagi aparatur Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan dalam menilai implementasi program serta kegiatan Tahun 2023.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan rencana kerja (RENJA) Tahun 2023 Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berisi tentang Penyusunan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2023 yang didasarkan pada tugas pokok dan fungsi serta kewenangan berdasarkan pasal 255, 256, dan 257 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja Untuk mendukung arah kebijakan pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan antara lain peningkatan kapasitas birokrasi dan kelembagaan.

1.2. Landasan Hukum

Memuat dasar regulasi sebagai acuan kebijakan dalam perencanaan dan penganggaran.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan penyusunan Renja Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan Pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta garis besar isi dokumen.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun lalu (n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengaju pada

hasil laporan kinerja tahunan PD dan/atau realisasi APBD untuk PD yang bersangkutan, dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program, kegiatan, sub kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun sebelumnya.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.

Dirumuskan berdasarkan analisis gambaran pelayanan PD, kajian hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD, serta kajian terhadap pencapaian kinerja Renstra PD.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD.

Berisikan Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan, Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan, Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarnya berbeda.

2.5. Penelaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Berisikan hasil kajian terhadap program/kegiatan/sub kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah Provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota (bila sudah dilakukan).

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah

3.2. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah.

Berdasarkan tujuan dan sasaran yang tertuang dalam Renstra PD, sesuai dengan tupoksi OPD, isu-isu penting penyelenggaraan Pemda, diidentifikasi tujuan dan sasaran Perangkat Daerah pada tahun perencanaan yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Memuat faktor-faktor yang menjadi pertimbangan terhadap rumusan program/kegiatan/sub kegiatan.

BAB V PENUTUP

Memuat Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, Kaidah-kaidah pelaksanaan dan Rencana tindak lanjut.

BAB II**HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU****2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah**

Evaluasi terhadap Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan meliputi 3 (tiga) hal, yaitu realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, realisasi program/kegiatan sub kegiatan yang memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan dan realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan. Selain itu juga dibahas mengenai implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra SKPD dan kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut. Secara umum Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga teknis daerah di Provinsi Sulawesi Selatan untuk melaksanakan kebijakan daerah yang bersifat spesifik. Dalam melaksanakan program/kegiatan/sub kegiatan yang bersifat administratif maupun bersifat teknis secara proposional telah berjalan dengan baik. Indikator keberhasilan terhadap pelaksanaan tugas ini adalah adanya komitmen kerja yang baik antara kepala dinas beserta bawahannya dan penguasaan di bidang tugas masing-masing pegawai dengan baik.

Plafon anggaran pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 sebesar Rp. 43.599.037.060,00 dengan realisasi sebesar Rp. 42.518.117.047,00 atau 97,52% dengan tingkat capaian kinerja 99,29%.

Berikut Evaluasi Hasil Pelaksanaan Program/kegiatan/sub kegiatan pada Renja Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan dan Pencapaian Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut :

HASIL EVALUASI PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2021

KODE ORGANISASI/ PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	NAMA ORGANISASI/ PROGRAM/ KEGIATAN			INDIKATOR KINERJA		JUMLAH DANA (Rp)	REALISASI KINERJA		TINGKAT CAPAIAN KINERJA		
				TOLAK UKUR	TARGET		K	(Rp)	K (%)	Rp (%)	
1.05.0.00.0.00.12.00				Satuan Polisi Pamong Praja			43.599.037.060,00		42.518.117.047,00	97.52	99.29
1.05.0.00.0.00.12.00	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Penurunan Temuan berdasarkan LHP	100 %	39.253.613.310,00	100 %	38.710.336.647,00	98.62	99.45
					Persentase ASN Perangkat daerah berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik	100 %		100 %			
					Persentase Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah	100 %		100 %			
1.05.0.00.0.00.12.00	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	% Penyusunan dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tepat waktu	100 %	285.678.800,00	100 %	257.873.800,00	90.27	100.00
1.05.0.00.0.00.12.00	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun	3 Dokumen	175.627.700,00	3 Dokumen	163.357.700,00	93.01	100.00
1.05.0.00.0.00.12.00	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang tersusun	1 Dokumen	20.873.900,00	1 Dokumen	7.093.900,00	33.98	100.00
1.05.0.00.0.00.12.00	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD yang tersusun	1 Dokumen	14.600.250,00	1 Dokumen	13.370.250,00	91.58	100.00
1.05.0.00.0.00.12.00	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang tersusun	1 Dokumen	5.137.500,00	1 Dokumen	5.137.500,00	100.00	100.00
1.05.0.00.0.00.12.00	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang tersusun	1 Dokumen	5.821.200,00	1 Dokumen	5.821.200,00	100.00	100.00
1.05.0.00.0.00.12.00	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang tersusun	1 Dokumen	5.051.500,00	1 Dokumen	5.051.500,00	100.00	100.00
1.05.0.00.0.00.12.00	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	4 Dokumen	58.566.750,00	4 Dokumen	58.041.750,00	99.10	100.00

KODE ORGANISASI/ PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN				NAMA ORGANISASI/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		JUMLAH DANA (Rp)	REALISASI KINERJA		TINGKAT CAPAIAN KINERJA	
					TOLAK UKUR	TARGET		K	(Rp)	K (%)	Rp (%)
1.05.0.00.0.00.12.00	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	% Penyusunan Dokumen Laporan Keuangan Tepat Waktu	100 %	20.527.633.154,00	100 %	20.512.421.073,00	99.93	100.00
1.05.0.00.0.00.12.00	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran gaji dan tunjangan ASN	1944 Orang/bulan	20.497.204.054,00	1944 Orang/bulan	20.486.801.973,00	99.95	100.00
1.05.0.00.0.00.12.00	01	1.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Laporan hasil pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Laporan	4.964.300,00	12 Laporan	3.404.300,00	68.58	100.00
1.05.0.00.0.00.12.00	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang tersusun	1 Laporan	1.960.600,00	1 Laporan	1.960.600,00	100.00	100.00
1.05.0.00.0.00.12.00	01	1.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Pemeriksaan Yang dikelola	20 Dokumen	3.749.500,00	20 Dokumen	3.749.500,00	100.00	100.00
1.05.0.00.0.00.12.00	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Koordinasi dan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulan /semesteran yang tersusun	18 Laporan	19.754.700,00	18 Laporan	16.504.700,00	83.55	100.00
1.05.0.00.0.00.12.00	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	% Pemenuhan Administrasi Barang Milik Daerah	100 %	4.378.400,00	100 %	4.378.400,00	100.00	100.00
1.05.0.00.0.00.12.00	01	1.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen RKBMD	2 Dokumen	1.318.900,00	2 Dokumen	1.318.900,00	100.00	100.00
1.05.0.00.0.00.12.00	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah yang tersusun	3 laporan	3.059.500,00	3 laporan	3.059.500,00	100.00	100.00
1.05.0.00.0.00.12.00	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rata-rata nilai perilaku pegawai perangkat daerah berdasarkan penilaian Kinerja ASN	100 %	153.964.000,00	100 %	87.481.000,00	56.82	56.82
1.05.0.00.0.00.12.00	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta atribut Kelengkapannya	255 Pasang	140.785.000,00	80 Pasang	74.302.000,00	52.78	52.78
1.05.0.00.0.00.12.00	01	1.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Jenis Administrasi kepegawaian	340 Jenis	13.179.000,00	340 Jenis	13.179.000,00	100.00	100.00

KODE ORGANISASI/ PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN				NAMA ORGANISASI/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		JUMLAH DANA (Rp)	REALISASI KINERJA		TINGKAT CAPAIAN KINERJA	
					TOLAK UKUR	TARGET		K	(Rp)	K (%)	Rp (%)
1.05.0.00.0.00.12.00	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	% Pemenuhan Administrasi Umum Kantor	100 %	470.807.000,00	100 %	437.380.139,00	92.90	100.00
1.05.0.00.0.00.12.00	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Intalasi Listril/Peneranga Bangunan yang tersedia	57 Unit	2.242.000,00	57 Unit	2.242.000,00	100.00	100.00
1.05.0.00.0.00.12.00	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah tangga yang tersedia	236 Jenis	9.906.500,00	236 Jenis	9.906.500,00	100.00	100.00
1.05.0.00.0.00.12.00	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Cetakan Dan Penggndaan yang tersedia	18625 Jenis	26.750.000,00	18625 Jenis	26.740.000,00	99.96	100.00
1.05.0.00.0.00.12.00	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bahan Bacaan dan peraturan Perundang -undangan yang tersedianya	12 Bulan	16.440.000,00	12 Bulan	16.190.000,00	98.48	100.00
1.05.0.00.0.00.12.00	01	1.06	08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah jamuan makan dan minum Yang Terlaksana	100 Tamu	12.640.000,00	100 Tamu	12.520.000,00	99.05	100.00
1.05.0.00.0.00.12.00	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Yang terlaksana	4 Rapat	342.927.000,00	4 Rapat	309.995.139,00	90.40	100.00
1.05.0.00.0.00.12.00	01	1.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Arsip Dinamis yang tertata	5156 Arsip	9.901.500,00	5156 Arsip	9.901.500,00	100.00	100.00
1.05.0.00.0.00.12.00	01	1.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Website yang dibayarkan	1 Aplikasi	50.000.000,00	1 Aplikasi	49.885.000,00	99.77	100.00
1.05.0.00.0.00.12.00	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	% Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	629.314.520,00	100 %	297.844.000,00	47.33	76.15
1.05.0.00.0.00.12.00	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Jenis Mebel yang tersedia	1 Paket	40.100.000,00	1 Paket	39.750.000,00	99.13	100.00
1.05.0.00.0.00.12.00	01	1.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor Dan bangunan Lainnya	1 Paket	299.654.520,00	1 Paket	97.575.000,00	32.56	92.86
1.05.0.00.0.00.12.00	01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana Dan Prasana Gedung Kantor Dan Bangunan Yang tersedia	8 Unit	289.560.000,00	8 Unit	160.519.000,00	55.44	55.56
1.05.0.00.0.00.12.00	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	% Pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	16.826.327.436,00	100 %	16.774.259.005,00	99.69	100.00
1.05.0.00.0.00.12.00	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Biaya Tagihan Telepon dan Internet	12 Bulan	12.360.000,00	12 Bulan	10.945.583,00	88.56	100.00

KODE ORGANISASI/ PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN				NAMA ORGANISASI/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		JUMLAH DANA (Rp)	REALISASI KINERJA		TINGKAT CAPAIAN KINERJA	
					TOLAK UKUR	TARGET		K	(Rp)	K (%)	Rp (%)
1.05.0.00.0.00.12.00	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	% Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik	100 %	355.510.000,00	100 %	338.699.230,00	95.27	100.00
1.05.0.00.0.00.12.00	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang terbayarkan	25 Unit	225.000.000,00	25 Unit	216.513.261,00	96.23	100.00
1.05.0.00.0.00.12.00	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Biaya Pemeliharaan Dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	9 Unit	95.040.000,00	9 Unit	87.010.312,00	91.55	100.00
1.05.0.00.0.00.12.00	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	41 Unit	35.470.000,00	41 Unit	35.175.657,00	99.17	100.00
1.05.0.00.0.00.12.00	02			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada di Provinsi (SPM)	100 %	3.972.914.900,00	100 %	3.446.506.550,00	86.75	97.67
1.05.0.00.0.00.12.00	02	1.01		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Keamanan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum)	100 %	3.397.114.500,00	100 %	2.909.872.750,00	85.66	97.27
1.05.0.00.0.00.12.00	02	1.01	01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Pencegahan Gangguan Trantibum Melalui cegah dini Jumlah Pelaksanaan Patroli Jumlah Pelaksanaan pengamanan dan pengawasan Jumlah Tenaga Keamanan dari instansi Vertical Jumlah Pembinaan dan Penyuluhan	80 Kali 75 Kali 120 Kali 276 Orang/Bulan 2 Kali	1.460.053.000,00	80 Kali 75 Kali 120 Kali 276 Orang/Bulan 2 Kali	1.415.265.250,00	96.93	100.00
1.05.0.00.0.00.12.00	02	1.01	02	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Penertiban yang terlaksana Jumlah Penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa	7 Kali 55 Kali	369.157.700,00	7 Kali 55 Kali	366.469.700,00	99.27	100.00
1.05.0.00.0.00.12.00	02	1.01	03	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Trantibum yang terlaksana	15 Kali		15 Kali			
1.05.0.00.0.00.12.00	02	1.01	04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Sosialisasi Trantibum yang terlaksana	48 kali	24.470.000,00	48 kali	22.879.000,00	93.50	100.00

KODE ORGANISASI/ PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN				NAMA ORGANISASI/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		JUMLAH DANA (Rp)	REALISASI KINERJA		TINGKAT CAPAIAN KINERJA	
					TOLAK UKUR	TARGET		K	(Rp)	K (%)	Rp (%)
1.05.0.00.0.00.12.00	02	1.01	05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang bermuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah Pembinaan Fisik dan Pelatihan Kesamaptaaan PoIPP	96 Kali	816.776.800,00	96 Kali	711.077.800,00	87.06	100.00
1.05.0.00.0.00.12.00	02	1.01	06	Kerja sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Jumlah pelaksanaan kerjasama antar lembaga yang terlaksana	5 Kali	81.907.000,00	5 Kali	79.107.000,00	96.58	100.00
1.05.0.00.0.00.12.00	02	1.01	07	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Keterlibatan Umum	Jumlah Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Trantibum	151 Unit	644.750.000,00	151 Unit	315.074.000,00	48.87	85.64
1.05.0.00.0.00.12.00	02	1.02		Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	% Tingkat Penyelesaian Kasus Pelanggaran PERDA dan PERKADA	100 %	575.800.400,00	100 %	536.633.800,00	93.20	100.00
1.05.0.00.0.00.12.00	02	1.02	01	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Sosialisasi Perda dan pergub yang terlaksana	3 kali	311.954.200,00	3 kali	292.607.200,00	93.80	100.00
1.05.0.00.0.00.12.00	02	1.02	02	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Pengawasan dan penanganan Area kawasan tanpa Rokok Jumlah Operasi Penertiban terhadap praktek praktek ilegal	55 Kali 10 kali	150.000.000,00	55 Kali 10 kali	135.948.600,00	90.63	100.00
1.05.0.00.0.00.12.00	02	1.02	03	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Kasus pelanggaran Perda dan Pergub yang diselesaikan	25 Kasus	113.846.200,00	25 Kasus	108.078.000,00	94.93	100.00
1.05.0.00.0.00.12.00	02	1.03		Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi	Presentase Kuantitas PPNS terhadap ASN Satpol PP	5%		5%			
1.05.0.00.0.00.12.00	02	1.03	01	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Peserta Bimtek PPNS	22 Orang		22 Orang			
1.05.0.00.0.00.12.00	03			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Korban Bencana yang tertangani	100 %	174.810.600,00	100 %	170.510.600,00	97.54	100.00
1.05.0.00.0.00.12.00	03	1.02		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Cakupan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	100 %	75.762.500,00	100 %	74.312.500,00	98.09	100.00
1.05.0.00.0.00.12.00	03	1.02	02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Jumlah pelaksanaan pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	3 Kali	75.762.500,00	3 Kali	74.312.500,00	98.09	100.00
1.05.0.00.0.00.12.00	03	1.04		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Cakupan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	100 %	99.048.100,00	100 %	96.198.100,00	97.12	100.00
1.05.0.00.0.00.12.00	03	1.04	03	Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	Jumlah Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	2 Kali	99.048.100,00	2 Kali	96.198.100,00	97.12	100.00

KODE ORGANISASI/ PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN				NAMA ORGANISASI/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		JUMLAH DANA (Rp)	REALISASI KINERJA		TINGKAT CAPAIAN KINERJA	
					TOLAK UKUR	TARGET		K	(Rp)	K (%)	Rp (%)
1.05.0.00.0.00.12.00	04			PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Cakupan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100 %	197.698.250,00	100 %	190.763.250,00	96.49	100.00
1.05.0.00.0.00.12.00	04	1.01		Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	Cakupan Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	100 %	111.289.000,00	100 %	106.754.000,00	95.93	100.00
1.05.0.00.0.00.12.00	04	1.01	09	Bimbingan Teknis Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah Bimbingan Teknis Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota	2 Kali	111.289.000,00	2 Kali	106.754.000,00	95.93	100.00
1.05.0.00.0.00.12.00	04	1.02		Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	100 %	86.409.250,00	100 %	84.009.250,00	97.22	100.00
1.05.0.00.0.00.12.00	04	1.02	01	Pembinaan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah koordinasi tentang Penanggulangan kebakaran yang terlaksana	2 Kali	86.409.250,00	2 Kali	84.009.250,00	97.22	100.00

Berikut Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (Tahun berjalan) dapat diuraikan pada Tabel TC. 29 sebagai berikut :

Tabel T-C.29.
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (Tahun berjalan)
Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan

Nama Perangkat Daerah : Satuan Polisi Pamong Praja

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Subkegiatan (Suboutput)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan					
					Target Renja Perangkat Tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)				
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)				
1	Urusan Wajib Pelayanan Daerah													
1	05	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat												
1	05	Satuan Polisi Pamong Praja												
1	05	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI											
			Persentase Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100,00%				
			Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100,00%				
			Persentase Penurunan Temuan Berdasarkan LHP	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100,00%				
1	05	01	1.01	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	% Penyusunan dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100,00%			
1	05	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun	2 Dokumen	-	3 Dokumen	3 Dokumen	100%	2 Dokumen	2 Dokumen	100,00%
1	05	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang tersusun	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%
1	05	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD yang tersusun	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%
1	05	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang tersusun	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%
1	05	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang tersusun	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Subkegiatan (Suboutput)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan					
					Target Renja Perangkat Tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)				
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)				
1	05	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang tersusun	1 Dokumen	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%
1	05	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	4 Dokumen	24 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100%	4 Dokumen	4 Dokumen	100,00%
1	05	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	% Penyusunan Dokumen Laporan Keuangan Tepat Waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100,00%
1	05	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran gaji dan tunjangan ASN	1944 Orang/Bulan	1 Tahun	1944 Orang/Bulan	1944 Orang/Bulan	100%	1944 Orang/Bulan	1944 Orang/Bulan	100,00%
1	05	01	1.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Laporan hasil pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Laporan	-	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Laporan	12 Laporan	100,00%
1	05	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang tersusun	1 Laporan	27 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	1 Laporan	100,00%
1	05	01	1.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Bahan Tanggapan Pemeriksaan yang dikelola	20 Laporan	-	20 Laporan	20 Laporan	100%	20 Laporan	20 Laporan	100,00%
1	05	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran yang disusun	18 Laporan	2 Laporan	18 Laporan	18 Laporan	100%	18 Laporan	18 Laporan	100,00%
1	05	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	% Penyusunan dokumen Laporan Aset/Barang Perangkat Daerah Tepat Waktu	100%	-	100%	100%	100%	100%	100%	100,00%
1	05	01	1.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah yang tersusun	2 Dokumen	-	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	2 Dokumen	100,00%
1	05	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah yang tersusun	3 Laporan	-	3 Dokumen	3 Dokumen	100%	3 Laporan	3 Laporan	100,00%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Subkegiatan (Suboutput)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
								Target Renja Perangkat Tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2				3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
1	05	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rata-rata nilai perilaku pegawai Perangkat daerah berdasarkan penilaian Kinerja ASN	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100,00%	
1	05	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	255 Orang	380 Orang	255 Orang	80 Orang	31%	255 Orang	255 Orang	100,00%
1	05	01	1.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Administrasi Kepegawaian	340 Jenis	30 Jenis	340,00	340,00	100%	340 Jenis	340 Jenis	100,00%
1	05	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	% Pemenuhan Administrasi Umum Kantor	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100,00%	
1	05	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang tersedia	50 Unit	30 Unit	57,00	57,00	100%	50 Unit	50 Unit	100,00%
1	05	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	250 Unit	-	236 Unit	236 Unit	100%	250 Unit	250 Unit	100,00%
1	05	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Cetak dan Penggandaan yang tersedia	18000 Jenis	110 Jenis	18625 Jenis	18625 Jenis	100%	18000 Jenis	18000 Jenis	100,00%
1	05	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang tersedia	12 Bulan	12 Bulan	1 Tahun	1 Tahun	100%	12 Bulan	12 Bulan	100,00%
1	05	01	1.06	08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Jamuan Makanan dan Minuman yang tersedia	100 Tamu	55,00	100 Tamu	100 Tamu	100%	100 Tamu	100 Tamu	100,00%
1	05	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang terlaksana	4 Rapat	180 Kali	4 Rapat	4 Rapat	100%	4 Rapat	4 Rapat	100,00%
1	05	01	1.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Jenis Arsip Dinamis yang tertata	5000 Jenis	-	5156 Jenis	5156 Jenis	100%	5000 Jenis	5000 Jenis	100,00%
1	05	01	1.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Website yang tersedia	1 Aplikasi	-	1 Aplikasi	1 Aplikasi	100%	1 Aplikasi	1 Aplikasi	100,00%
1	05	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	% Pemenuhan Administrasi Umum Kantor	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100,00%	
1	05	01	1.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan operasional roda 4	2 Unit	-	-	-	0%	-	-	0,00%
1	05	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang tersedia	1 Paket	-	1 Unit	1 Unit	100%	1 Paket	1 Paket	100,00%
1	05	01	1.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang tersedia	1 Paket	15,00	1 Unit	1 Unit	100%	1 Paket	1 Paket	100,00%
1	05	01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang tersedia	8 Unit	12,00	8 Unit	8 Unit	100%	8 Unit	8 Unit	100,00%

Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Subkegiatan (Suboutput)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
								Target Renja Perangkat Tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2				3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
1	05	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	% Pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100,00%	
1	05	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah biaya tagihan telepon, Internet, air dan listrik	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	12 Bulan	100,00%
1	05	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor	5808 Orang/Bulan	12 Bulan	1 Tahun	1 Tahun	100%	5808 Orang/Bulan	5808 Orang/Bulan	100,00%
1	05	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	% Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100,00%	
1	05	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang terbayarkan	25 Unit	25 Unit	25 Unit	25 Unit	100%	25 Unit	25 Unit	100,00%
1	05	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang terbayarkan	9 Unit	13 Unit	9 Unit	9 Unit	100%	9 Unit	9 Unit	100,00%
1	05	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	41 Unit	150 Unit	41 Unit	41 Unit	100%	41 Unit	41 Unit	100,00%
1	05	1.05.02			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada di Provinsi (SPM/Prioritas)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100,00%	
1	05	1.05.02	01		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Keamanan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100,00%	
1	05	1.05.02	01	01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Keterliban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini Pembinaan dan Penyuluhan Pelaksanaan Patroli Pengamanan dan Pengawasan	Jumlah Gangguan Ketenteraman dan Keterliban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini.	80 Kali	200 Orang	80 Kali	80 Kali	100%	80 Kali	80 Kali	100,00%
						Jumlah Pelaksanaan Patroli	75 Kali	80 Kali	75 Kali	75 Kali	100%	75 Kali	75 Kali	100,00%
						Jumlah Pelaksanaan Pengamanan, dan Pengawasan	120 Kali	120 Kali	120 Kali	120 Kali	100%	120 Kali	120 Kali	100,00%
						Jumlah Pembinaan dan Penyuluhan	2 Kali	90 Kali	2 Kali	2 Kali	100%	2 Kali	2 Kali	100,00%
						Jumlah Tenaga Keamanan dar instansi vertical	276 Orang/Bulan	23 Orang	276 Orang/Bulan	276 Orang/Bulan	100%	276 Orang/Bulan	276 Orang/Bulan	100,00%
1	05	1.05.02	01	02	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Keterliban Umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	35 Kali	35 Kali	35 Kali	35 Kali	100%	35 Kali	35 Kali	100,00%
						Jumlah Penerbitan yang terlaksana	7 Kali	7 Kali	7 Kali	7 Kali	100%	7 Kali	7 Kali	100,00%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Subkegiatan (Suboutput)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan						
					Target Renja Perangkat Tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)					
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)					
1	05	1.05.02	01	03	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	Jumlah koordinasi Penyelenggaraan Trantibum yang terlaksana	15 Kali	10 Kali	15 Kali	15 Kali	100%	15 Kali	15 Kali	100,00%	
1	05	1.05.02	01	04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Sosialisasi linmas yang terlaksana	50 Kali	55 Orang	48 Kali	48 Kali	100%	49 Kali	49 Kali	98,00%	
1	05	1.05.02	01	05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah pembinaan fisik dan pelatihan kesamaptaan POLPP	96 Kali	300 Orang	96 Kali	96 Kali	100%	96 Kali	96 Kali	100,00%	
1	05	1.05.02	01	06	Kerja sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Jumlah pelaksanaan kerjasama antar lembaga yang terlaksana	5 Kali	5 Kali	5 Kali	5 Kali	100%	5 Kali	5 Kali	100,00%	
1	05	1.05.02	01	07	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Trantibum	150 Kali	-	151 Kali	151 Kali	100%	150 Kali	150 Kali	100,00%	
1	05	1.05.02	02		Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	% Tingkat Penyelesaian Kasus Pelanggaran PERDA dan PERKADA	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100,00%
1	05	1.05.02	02	01	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Sosialisasi Perda dan Pergub yang terlaksana	3 Kali	100 Orang	3 Kali	3 Kali	100%	3 Kali	3 Kali	100,00%	
1	05	1.05.02	02	02	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Operasi Penerbitan terhadap Praktek-praktek Illegal	10 Kali	20 Kali	10 Kali	10 Kali	100%	10 Kali	10 Kali	100,00%	
						Jumlah Pengawasan dan Penanganan Area Kawasan Tanpa Rokok	55 Kali	10 Kali	55 Kali	55 Kali	100%	55 Kali	55 Kali	100,00%	
1	05	1.05.02	02	03	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Kasus pelanggaran Perda dan Pergub yang diselesaikan	25 Kasus	15 Kasus	25 Kasus	25 Kasus	100%	25 Kasus	25 Kasus	100,00%	
1	05	1.05.02	03		Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil PPNS Provinsi	Presentase Kuantitas PPNS terhadap ASN Satpol PP	15%	100%	5%	0%	0%	10%	10%	66,67%	
1	05	1.05.02	03	01	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Peserta Bimtek PPNS	25 Orang	35 Orang	22 Orang	Orang	0%	25 Orang	25 Orang	100,00%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Subkegiatan (Suboutput)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Keluaran Kegiatan s/d	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan					
					Target Renja Perangkat Tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)				
											6	7	8=(7/6)	9
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)				
1	05	1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Korban Bencana yang tertangani	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100,00%			
				Persentase Aparat Kesiapsiagaan Bencana yang terlatih	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100,00%		
1	05	1.05.03	01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi	% Layanan Informasi Rawan Bencana	100%	100%	-	-	#DIV/0!	100%	100%	100,00%	
1	05	1.05.04	01	01	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Provinsi	Jumlah dokumen kajian resiko bencana	0 Dokumen	3 Kali	-	-	0%	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%
1	05	1.05.04	01	02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana)	Jumlah Angkatan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi	1 Dokumen	70 Orang	-	-	0%	-	-	100,00%
1	05	1.05.03	02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Cakupan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100,00%
1	05	1.05.04	02	02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Jumlah pelaksanaan pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	3 Kali	60 Orang	3 Kali	3 Kali	100%	3 Kali	3 Kali	100,00%
1	05	1.05.03	04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Cakupan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100,00%
1	05	1.05.04	04	03	Kejasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	Jumlah Kejasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	2 Kali	-	2 Kali	2 Kali	100%	2 Kali	2 Kali	100,00%
1	05	1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN PENANGGULANGAN PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran (Prioritas)	41%	100%	37%	37%	100%	40%	40%	97,56%		
				Respon Time Rate	85%	100%	82%	82%	100%	83%	83%	97,65%		
1	05	1.05.04	01	Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	Cakupan Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	50%	100%	25%	25%	100%	35%	35%	70,00%	
1	05	1.05.04	01	01	Penyediaan dan Pemutakhiran Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran	Tersedianya data Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran	0 Dokumen	15 Kali	-	-	0%	1 Dokumen	1 Dokumen	0,00%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Subkegiatan (Suboutput)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Keluaran Kegiatan s/d	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan					
					Target Renja Perangkat Tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)				
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)				
1	05	1.05.04	01	04	Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi Antar Daerah Berbatasan Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pencegahan Penanggulangan Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah Kab/Kota yang melakukan Kerjasama dan Koordinasi Antar Daerah Berbatasan, Antar Lembaga, dan Kemitraan	12 Kab/kota	-	-	-	0%	12 Kab/kota	12 Kab/kota	100,00%
1	05	1.05.04	01	09	Bimbingan Teknis Terkait Pencegahan Penanggulangan Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah Bimbingan Teknis Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota	2 Kali	60 Orang	2 Kali	2 Kali	100%	2 Kali	2 Kali	100,00%
1	05	1.05.04	02		Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan Penanggulangan Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	85%	100%	82%	82%	100%	83%	83%	97,65%
1	05	1.05.04	02	01	Pembinaan Penyelenggaraan Pencegahan Penanggulangan Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah Rapat koordinasi yang terlaksana	2 Kali	50 Orang	2 Kali	2 Kali	100%	2 Kali	2 Kali	100,00%

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan dibentuk melalui Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 293) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 309) dan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 50 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Polisi Pamong Praja yang memiliki tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- b. pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- c. pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat dengan instansi terkait;
- d. pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum atas pelaksanaan Perda dan Perkada; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain berdasarkan tugas yang diberikan oleh kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pencapaian kinerja pelayanan perangkat daerah Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan disajikan dalam tabel T-C.30 berikut. :

Tabel T-C.30.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja
Provinsi Sulawesi Selatan

No.	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021 (thn n-2)	Tahun 2022 (thn n-1)	Tahun 2023 (thn n)	Tahun 2024 (thn n+1)	Tahun 2021 (thn n-2)	Tahun 2022 (thn n-1)	Tahun 2023 (thn n)	Tahun 2024 (thn n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Nilai Sakip Perangkat Daerah	-	Bobot Hasil Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	70	75	80	80	70	75	80	80	
2	Rata-Rata Capaian Kinerja Perangkat Daerah	-	Prosentase Realisasi Fisik dan Keuangan atas Program/kegiatan /sub kegiatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
3	Presentase ASN dengan Nilai SKP Kategori Baik	-	Prosentase SKP ASN berkinerja baik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
4	Persentase Temuan Materil	-	Prosentase Temuan Materil berdasarkan hasil audit	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
5	Kuantitas Aparat Satuan Polisi Pamong Praja yang profesiona dan terlatih	Peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota perlindungan masyarakat	Jumlah Aparat Satpol PP yang terlatih	550 Orang	625 Orang	750 Orang	750 Orang	550 Orang	625 Orang	750 Orang	750 Orang	
6	Presentase Aparat Satuan Polisi Pamong Praja yang Berkompetensi Fungsional Khusus	Peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota perlindungan masyarakat	Jumlah Aparat Satpol PP yang lulus/berkompeten pada setiap tes inpassing	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

No.	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021 (thn n-2)	Tahun 2022 (thn n-1)	Tahun 2023 (thn n)	Tahun 2024 (thn n+1)	Tahun 2021 (thn n-2)	Tahun 2022 (thn n-1)	Tahun 2023 (thn n)	Tahun 2024 (thn n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
7	Presentase Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
8	Kuantitas Petugas Perlindungan Masyarakat		Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	42000 Orang	42500 Orang	43000 Orang	43000 Orang	42000 Orang	42500 Orang	43000 Orang	43000 Orang	
9	Persentase Tingkat Penyelesaian Pelanggaran k3 (Ketertiban, Ketenteraman, Ketertiban)		Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	94%	95%	96%	96%	94%	95%	96%	96%	
10	Persentase Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran			55%	60%	65%	65%	55%	60%	65%	65%	
11	Persentase Respon Time Rate			88%	90%	95%	95%	88%	90%	95%	95%	

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Aspek strategis Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 12 ayat 1 (satu) huruf e, disebutkan bahwa ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat merupakan urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang harus diselenggarakan dan menjadi tugas dari Kepala Daerah. Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan adalah tangan dari Kepala Daerah untuk membantu dalam hal penyelenggaraan pemeliharaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, dibentuk untuk menegakan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman, serta perlindungan masyarakat.

Suasana tenang dan tertib menjadi modal dasar baik dalam menjalankan roda pemerintahan dan roda perekonomian, kedua hal tersebut akan berjalan optimal apabila kondisi menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman, serta perlindungan masyarakat tidak tercipta dengan baik oleh sebab itu, ketiga aspek pelayanan dasar tersebut menjadi aspek strategis bagi Satuan Polisi Pamong Praja sehingga pemerintah berkewajiban mendukung penguatan kelembagaan dan penganggaran guna menunjang pelaksanaan cipta kondisi tertib serta perlindungan masyarakat yang kondusif dan berjalan secara optimal.

Isu strategis berkaitan dengan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman, serta perlindungan masyarakat berdasarkan tugas pokok dan fungsi diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan.

Berdasarkan Capaian Kinerja Pembangunan Tahun 2018-2023, juga melihat fakta permasalahan yang krusial dan tantangan pada tahun 2018-2023, maka dapat digambarkan perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yaitu :

1. Kuantitas dan kualitas sumber daya manusia yang belum memadai, terutama anggota Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan yang bersertifikasi/memiliki keahlian khusus seperti intelijen, PPNS maupun pengadaan barang/jasa masih minim, tentu saja sangat berpengaruh terhadap kinerja pelayanan OPD;
2. Masih terbatasnya sarana dan prasarana untuk menunjang ketugasan;
3. Koordinasi dan kerjasama antar instansi, kabupaten/kota, masyarakat, dan stake holders masih kurang;
4. Pengawasan dan Penegakan Peraturan Daerah maupun Peraturan Kepala Daerah belum optimal seiring dengan perkembangan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang semakin kompleks;
5. Wilayah perbatasan rawan gangguan keamanan, ketenteraman dan ketertiban umum yang masih belum mendapat perhatian khusus. Dukungan anggaran dan kerjasama dengan mitra kerja/ instansi terkait sangat diperlukan;
6. Belum optimalnya koordinasi dalam penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat dan penegakan Peraturan Daerah;

7. Dampak dari penanganan Extra Ordinary (Luar Biasa) akibat pandemi Covid-19 menjadi persoalan, tantangan dan ujian bersama;

Pemasalahan dalam penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat Dan Perlindungan Masyarakat berdampak terhadap Pencapaian Visi dan Misi Provinsi Sulawesi Selatan terutama Misi Pertama 'Pemerintahan yang Berorientasi Melayani dan Inovatif' dan Misi Keempat 'Pembangunan manusia yang kompetitif dan inklusif' paradigma Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat Dan Perlindungan Masyarakat Dan Penegakan Peraturan Daerah yang sebelumnya responsif (tanggap darurat) menjadi preventif (kesiagaan), untuk itu perlu dilakukan peningkatan kapasitas aparatur Satuan Polisi Pamong Praja dan masyarakat dalam Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat, Perlindungan Masyarakat dan Penegakan Peraturan Daerah.

Rekomendasi Strategis dalam penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat di Provinsi Sulawesi Selatan.

1. Aspek regulasi, perlu meningkatkan kompetensi serta kapasitas SDM dalam setiap organisasi, diperlukan sebuah kegiatan berupa Bimtek, Diklat (Pendidikan dan Pelatihan) yang berjenjang agar mendapatkan pengetahuan yang mungkin belum didapatkan atau sebagai penyegaran kembali (refreshing);
2. Aspek kebutuhan personil yang merupakan sebuah pondasi yang sangat penting dalam aktivitas sebuah organisasi. Keberhasilan kinerja dalam aktivitas juga sangat ditentukan oleh SDM, berdasarkan kualitas (kapasitas, kompetensi) dan kuantitas SDM. Permasalahan SDM Satpol PP lebih banyak dititik beratkan pada kuantitasnya. Tidak ada rekrutmen baru untuk anggota PNS. Di luar hal tersebut, SDM Satpol PP harus menerima beban pekerjaan yang semakin besar dan cenderung bersifat tidak teratur/bersifat ad hoc
3. Aspek sarana prasarana, untuk mendukung kegiatan operasi dibutuhkan sarana prasarana pendukung dengan mencoba mengusulkan kebutuhan untuk kegiatan patroli sesuai dengan SOP, bahwa Satpol PP melaksanakan patroli 3 (tiga) kali dalam sehari.
4. Aspek pembiayaan, jelas bahwa untuk mendukung kegiatan operasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat Dan Perlindungan Masyarakat dibutuhkan anggaran yang memadai melalui usulan anggaran dalam program dan kegiatan.

2.4. Review terhadap Rancangan Akhir RKPD

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 disusun dengan berpedoman kepada RPJPD dan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan. Dalam kedua dokumen perencanaan jangka menengah dan jangka panjang tersebut, penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat dan penegakan Peraturan Daerah di Provinsi Sulawesi Selatan belum menjadi kebijakan utuh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan karena masih menjadi bagian dalam kebijakan Kesbangpol. Atas dasar tersebut, perlu adanya komitmen Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan terkait penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat,

Perlindungan Masyarakat Dan Penegakan Peraturan Daerah di Provinsi Sulawesi Selatan sesuai dengan Permendagri Nomor 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal bidang Pemerintahan Dalam Negeri yang tertuang dalam RKPD Provinsi Sulawesi Selatan untuk tahun-tahun mendatang.

Berdasarkan kebutuhan pendanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dan Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, dalam Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 bahwa Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN sudah masuk dalam sub kegiatan, Satuan Polisi Pamong Praja masih membutuhkan sarana, prasarana dan anggaran yang memadai untuk membiaya program, kegiatan dan sub kegiatan dalam Penyelenggaraan Ketertiban umum, ketenteraman masyarakat, perlindungan masyarakat dan penegakan peraturan daerah.

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan tugas pokok dan fungsinya pada awal penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) mengacu kepada 3 (Tiga) Program, 16 (Enam Belas) Kegiatan dan 53 (Lima Puluh Tiga) Kegiatan, Review terhadap rancangan akhir RKPD tahun 2023 dapat dilihat pada tabel T-C.31

TABEL T-C.31.
Review terhadap Rancangan Akhir RKPD Tahun 2023
Provinsi Sulawesi Selatan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
			Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Targ et	Pagu Indikatif					
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
1	05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT							48.079.541.072	53.258.709.169			
1	05	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							42.290.714.822	46.134.709.169		
1	05	01	1,01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							434.358.300	540.878.600	
1	05	01	1,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	298.131.400	Kota Makassar, Panakkukang, Panaikang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2 Dokumen	400.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	01	1,01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	11.042.000	Kota Makassar, Panakkukang, Panaikang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Dokumen	15.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif	
1	05	01	1,01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	14.254.700	Kota Makassar, Panakkukang, Panaikang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Dokumen	63.343.100	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	01	1,01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	17.791.500	Kota Makassar, Panakkukang, Panaikang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Dokumen	15.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	01	1,01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	60.893.900	Kota Makassar, Panakkukang, Panaikang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Dokumen	11.565.250	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	01	1,01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	15.718.800	Kota Makassar, Panakkukang, Panaikang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Laporan	15.970.250	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	01	1,01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	16.526.000	Kota Makassar, Panakkukang, Panaikang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4 Laporan	20.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	01	1,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			20.632.500.474				23.065.647.041	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Targ et	Pagu Indikatif	
1	05	01	1,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1944 Orang/Bulan	20.527.519.424	Kota Makassar, Panakkukang, Panaikang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1944 Orang/Bulan	22.960.522.041	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	01	1,02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	57.921.300	Kota Makassar, Panakkukang, Panaikang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Dokumen	67.052.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	01	1,02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	13.399.000	Kota Makassar, Panakkukang, Panaikang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Laporan	5.107.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	01	1,02	06	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	20 Dokumen	8.943.750	Kota Makassar, Panakkukang, Panaikang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	20 Dokumen	6.516.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	01	1,02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran S dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	24.717.000	Kota Makassar, Panakkukang, Panaikang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	18 Laporan	26.450.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	01	1,03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			9.498.750				22.000.000	
1	05	01	1,03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	5.442.750	Kota Makassar, Panakkukang, Panaikang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2 Dokumen	10.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Targ et	Pagu Indikatif	
1	05	01	1,03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 Laporan	4.056.000	Kota Makassar, Panakkukang, Panaikang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Laporan	12.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	01	1,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			232.950.750				375.800.000	
1	05	01	1,05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	0 Paket 150 Paket	216.000.000	Kota Makassar, Panakkukang, Panaikang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0 Paket 150 Paket	305.800.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	01	1,05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah pelaksanaan penilaian Dupak Fungsional	340 Dokumen 2 kali	16.950.750	Kota Makassar, Panakkukang, Panaikang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	340 Dokumen 2 kali	70.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	01	1,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			474.420.400				697.551.000	
1	05	01	1,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	50 Paket	4.135.000	Kota Makassar, Panakkukang, Panaikang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	50 Paket	7.500.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	01	1,06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	250 Paket	3.307.000	Kota Makassar, Panakkukang, Panaikang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	250 Paket	17.250.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	01	1,06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	18000 Paket	15.325.000	Kota Makassar, Panakkukang, Panaikang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	18000 Paket	52.800.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif	
1	05	01	1,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	608.000	Kota Makassar, Panakkukang, Panaikang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Dokumen	24.200.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	01	1,06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	10.875.000	Kota Makassar, Panakkukang, Panaikang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Laporan	17.250.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	01	1,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan	378.025.000	Kota Makassar, Panakkukang, Panaikang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	100 Laporan	450.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	01	1,06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	5000 Dokume	12,145,400 ⁿ	Kota Makassar, Panakkukang, Panaikang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5000 Dokume	28,551,000 ⁿ	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	01	1,06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	50.000.000	Kota Makassar, Panakkukang, Panaikang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Dokumen	100.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	01	1,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			693.642.500				1.650.000.000	
1	05	01	1,07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	51.000.000	Kota Makassar, Panakkukang, Panaikang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Paket	200.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	01	1,07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	150.000.000	Kota Makassar, Panakkukang, Panaikang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Unit	100.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	01	1,07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	8 Unit	492.642.500	Kota Makassar, Panakkukang, Panaikang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8 Unit	700.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Targ et	Pagu Indikatif	
1	05	01	1,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
1	05	01	1,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	19.572.000	Kota Makassar, Panakkukang, Panaikang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Laporan	25.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	01	1,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	19.332.795.648	Kota Makassar, Panakkukang, Panaikang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Laporan	19.082.832.528	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	01	1,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			460.976.000				675.000.000	
1	05	01	1,09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	25 Unit	331.980.000	Kota Makassar, Panakkukang, Panaikang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	25 Unit	375.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	01	1,09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 Unit	96.496.000	Kota Makassar, Panakkukang, Panaikang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	9 Unit	200.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	01	1,09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0 Unit 41 Unit	32.500.000	Kota Makassar, Panakkukang, Panaikang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0 Unit 41 Unit	100.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	02			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			4.406.894.750				5.154.000.000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Targ et	Pagu Indikatif	
1	05	02	1,01		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi								
1	05	02	1,01	01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan dan Pengawasan	277 Kasus	413.044.350	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	277 Kasus	800.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	02	1,01	02	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	42 Kasus	2.201.000.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	42 Kasus	2.300.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Targ et	Pagu Indikatif	
1 05 02 1,01 03	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	0 Dokumen 15 Dokumen	489.818.250	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0 Dokumen 15 Dokumen	500.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1 05 02 1,01 04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	0 Dokumen 50 Dokumen	74.709.250	Kota Makassar, Panakkukang, Panaikang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0 Dokumen 50 Dokumen	100.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1 05 02 1,01 05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	3840 Orang	273.981.350	Kota Makassar, Panakkukang, Panaikang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3840 Orang	10.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Targ et	Pagu Indikatif	
1	05	02	1,01	06	Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	5 Dokumen	5.731.500	Kota Makassar, Panakkukang, Panaikang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5 Dokumen	50.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	02	1,01	07	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	150 Unit	10.085.000	Kota Makassar, Panakkukang, Panaikang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	150 Unit	4.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	02	1,02		Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur			828.745.800				1.140.000.000	
1	05	02	1,02	01	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	3 Laporan	297.142.900	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Laporan	320.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	02	1,02	02	Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	65 Laporan	266.222.750	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	65 Laporan	420.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	02	1,02	03	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Sesuai SOP	25 Laporan	265.380.150	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	25 Laporan	400.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	02	1,03		Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi			109.779.250				250.000.000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Targ et	Pagu Indikatif	
1	05	02	1,03	01	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda	25 Laporan	109.779.250	Kota Makassar, Panakkukang, Panaikang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	25 Laporan	250.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	03			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA			715.712.200				940.000.000	
1	05	03	1,01		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi			245.314.200				325.000.000	
1	05	03	1,01	02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana)	Jumlah Orang yang Tersedia untuk Melaksanakan Sosialisasi KIE Rawan Bencana (Per Jenis Bencana) Lintas Kabupaten/Kota	80 Orang	245.314.200	Kota Makassar, Panakkukang, Panaikang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	80 Orang	325.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	03	1,02		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana			265.798.800				315.000.000	
1	05	03	1,02	02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Jumlah Aparatur Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Memperoleh Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	100 Orang	265.798.800	Kota Makassar, Panakkukang, Panaikang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	100 Orang	315.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	03	1,04		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana			204.599.200				300.000.000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Targ et	Pagu Indikatif	
1	05	03	1,04	03	Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	2 Dokumen	204.599.200	Kota Makassar, Panakkukang, Panaikang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2 Dokumen	300.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	04			PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN			666.219.300				1.030.000.000	
1	05	04	1,01		Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran			573.580.050				780.000.000	
1	05	04	1,01	04	Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi Antar Daerah Berbatasan, Antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi Antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi Antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	0 Dokumen 12 Dokumen	205.581.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0 Dokumen 12 Dokumen	200.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Targ et	Pagu Indikatif	
1 05 04 1,01 09	Bimbingan Teknis Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah Aparatur Kebakaran yang Mengikuti Bimbingan Teknis Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota) Jumlah Aparatur Kebakaran yang Mengikuti Bimbingan Teknis Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota) Jumlah Pelatihan Dasar Pemadan Kebakaran	0 Orang 100 Orang 2 kali	367.999.050	Kota Makassar, Panakkukang, Panaikang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0 Orang 100 Orang 2 kali	500.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1 05 04 1,02	Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran			92.639.250				250.000.000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Targ et	Pagu Indikatif	
1	05	04	1,02	01	Pembinaan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	2 Laporan	92.639.250	Kota Makassar, Panakkukang, Panaikang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2 Laporan	250.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
TOTAL								48.079.541.072				53.258.709.169	

2.5. Penelaahan Usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Masyarakat

Program, kegiatan dan sub kegiatan masyarakat sepenuhnya diusulkan dari bidang teknis dan Sekretariat dilingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan. Usulan-usulan program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut selanjutnya dievaluasi berdasarkan isu-isu strategis yang terdapat dalam masyarakat dengan disinkronkan sesuai tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan.

Selanjutnya seluruh usulan program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut dibahas dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan untuk menyelaraskan dengan kebijakan perencanaan dan penganggaran yang ada. Adapun usulan program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel T-C.32 berikut :

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2023 belum melaksanakan Penelaahan Usulan Program, kegiatan dan sub kegiatan kepada masyarakat yang secara langsung menjadi program kegiatan dan sub kegiatan yang ada di Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan dapat dilihat pada Tabel T-C.32 berikut

Tabel T-C.32.
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023
Provinsi Sulawesi Selatan

Nama Perangkat Daerah : Satuan Polisi Pamong Praja

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
-	-	-	-	-	-

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 merupakan penjabaran dari RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023. serta merujuk pada prioritas pembangunan Nasional sebagaimana termuat dalam RKP Tahun 2023 dan RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023.

3.1. Telaahan terhadap kebijakan Nasional

Prioritas Nasional dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2018 untuk mewujudkan visi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 seperti yang tertuang dalam Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023, yaitu : “Sulawesi Selatan yang Inovatif, Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkarakter”

Untuk mencapai visi tersebut, implementasinya dijabarkan dalam 5 misi pembangunan yaitu :

1. Pemerintahan yang Berorientasi Melayani dan Inovatif;
2. Peningkatan Infrastruktur yang berkualitas dan aksesibel;
3. Pembangunan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi;
4. Pembangunan manusia yang kompetitif dan inklusif;
5. Peningkatan produktivitas dan daya saing produk Sumber Daya Alam yang berkelanjutan.

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan masuk dalam misi Pertama ‘Pemerintahan yang Berorientasi Melayani dan Inovatif’ dan misi Keempat ‘Pembangunan manusia yang kompetitif dan inklusif’. Untuk mencapai misi pertama dan keempat serta tujuan dan sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan untuk Mewujudkan Aparat Satuan Polisi Pamong Praja yang profesional dan mewujudkan pemahaman dan kesadaran masyarakat provinsi sulawesi selatan terhadap pentingnya keikutsertaan dalam mematuhi Peraturan daerah, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, Perlindungan Masyarakat serta penanggulangan bencana kebakaran yang berkarakter kearifan lokal. Indikator tercapainya tujuan tersebut adalah dengan meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Dasar.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan (Critical Success Factor) yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai. Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga lainnya yang melaksanakan penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Adapun dalam Program Bina Administrasi Kewilayahan dengan sasaran program yaitu meningkatnya konsolidasi dan koordinasi kebijakan penguatan peran gubernur sebagai wakil

Pemerintah, peningkatan pelayanan publik dan kerjasama daerah, serta penataan wilayah administrasi dan kawasan (kawasan khusus dan kawasan perkotaan), dan batas antar Negara; serta meningkatnya standarisasi dan kualitas implementasi teknis kebijakan bidang Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat serta pencegahan dan penganggulangan bencana dan bahaya kebakaran. Adapun Indikator Kegiatan Program (IKP) Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan, yaitu:

- a. Presentase kinerja peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah dalam pelaksanaan koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- b. Penerapan kebijakan pelayanan publik di daerah;
- c. Tertibnya penataan wilayah administrasi batas antar daerah;
- d. Peningkatan efektivitas kerjasama perbatasan antar negara di 3 (tiga) negara tetangga di kawasan perbatasan wilayah darat;
- e. Penyediaan layanan dasar bidang ketentraman dan ketertiban umum sesuai SPM (Standar Pelayanan Minimal);
- f. Penyediaan layanan dasar bidang penanggulangan bencana dan bahaya kebakaran sesuai SPM (Standar Pelayanan Minimal).

Tujuan dan Sasaran merupakan penjabaran/implementasi dari pernyataan misi dengan didasarkan pada isu–isu dan analisis strategik dan juga merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan pada jangka waktu 1 s/d 5 tahunan. Tujuan ini tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang.

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam Renja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023, seperti yang tertuang dalam Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018- 2023 yaitu :

1. Meningkatkan Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintah yang baik;
2. Meningkatkan Kualitas SDM secara inklusif.

dan sasaran dalam pencapaian visi misi yang akan dilaksanakan, yaitu :

1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan;
2. Meningkatnya Aktualisasi Nilai-nilai Agama dan Budaya dalam kehidupan masyarakat.

Tujuan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan merupakan sesuatu yang akan dicapai dimasa yang akan datang. Perumusan tujuan akan mengarahkan kepada perumusan sasaran, kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Apabila dikaitkan dengan pencapaian Visi dan Misi Provinsi Sulawesi Selatan, pada dasarnya sub kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan adalah sebagai Perangkat Daerah yang memiliki fungsi dalam penyelenggaraan penegakan Peraturan Perundang-undangan daerah, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat di Provinsi Sulawesi Selatan. Sejalan dengan Misi Pertama 'Pemerintahan yang Berorientasi Melayani dan Inovatif' dan Misi Keempat 'Pembangunan manusia yang kompetitif dan inklusif.

Program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan rancangan akhir RKPD maka Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan 2023 terdiri atas 4 (Empat) Program, 16 (Enam Belas) Kegiatan dan 51 (Lima Puluh Satu) Sub Kegiatan dengan jumlah pagu indikatif sebesar Rp. 44.079.541.072,00. Rekapitulasi program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel T-C.33.

Tabel T-C.33
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023
Dan Prakiraan Maju Tahun 2024
Provinsi Sulawesi Selatan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
			Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif					
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
1	05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				48.079.541.072	53.258.709.169						
1	05	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				42.290.714.822	46.134.709.169					
1	05	01	1,01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				434.358.300	540.878.600				
1	05	01	1,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	298.131.400	Kota Makassar, Panakkukang, Panaikang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2 Dokumen	400.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	01	1,01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	11.042.000	Kota Makassar, Panakkukang, Panaikang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Dokumen	15.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	01	1,01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	14.254.700	Kota Makassar, Panakkukang, Panaikang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Dokumen	63.343.100	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Targ et	Pagu Indikatif	
1	05	01	1,01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	17.791.500	Kota Makassar, Panakkukang, Panaikang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Dokumen	15.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	01	1,01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	60.893.900	Kota Makassar, Panakkukang, Panaikang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Dokumen	11.565.250	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	01	1,01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	15.718.800	Kota Makassar, Panakkukang, Panaikang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Laporan	15.970.250	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	01	1,01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	16.526.000	Kota Makassar, Panakkukang, Panaikang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4 Laporan	20.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	01	1,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			20.632.500.474				23.065.647.041	
1	05	01	1,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1944 Orang/ Bulan	20.527.519.424	Kota Makassar, Panakkukang, Panaikang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1944 Orang/ Bulan	22.960.522.041	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	01	1,02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	57.921.300	Kota Makassar, Panakkukang, Panaikang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Dokumen	67.052.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Targ et	Pagu Indikatif	
1	05	01	1,02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	13.399.000	Kota Makassar, Panakkukang, Panaikang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Laporan	5.107.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	01	1,02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	20 Dokumen	8.943.750	Kota Makassar, Panakkukang, Panaikang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	20 Dokumen	6.516.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	01	1,02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuanga Bulanan/ Triwulanan/Semesteran S dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keu Bulanan/Triwulanan/Seme SKPD	18 Laporan	24.717.000	Kota Makassar, Panakkukang, Panaikang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	18 Laporan	26.450.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	01	1,03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			9.498.750				22.000.000	
1	05	01	1,03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	5.442.750	Kota Makassar, Panakkukang, Panaikang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2 Dokumen	10.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	01	1,03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 Laporan	4.056.000	Kota Makassar, Panakkukang, Panaikang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Laporan	12.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	01	1,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			232.950.750				375.800.000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Targ et	Pagu Indikatif	
1 05 01 1,05 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	0 Paket 150 Paket	216.000.000	Kota Makassar, Panakkukang, Panaikang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0 Paket 150 Paket	305.800.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1 05 01 1,05 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah pelaksanaan penilaian Dupak Fungsional	340 Dokumen 2 kali	16.950.750	Kota Makassar, Panakkukang, Panaikang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	340 Dokumen 2 kali	70.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1 05 01	1,06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		474.420.400				697.551.000	
1 05 01 1,06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	50 Paket	4.135.000	Kota Makassar, Panakkukang, Panaikang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	50 Paket	7.500.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1 05 01 1,06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	250 Paket	3.307.000	Kota Makassar, Panakkukang, Panaikang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	250 Paket	17.250.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1 05 01 1,06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	18000 Paket	15.325.000	Kota Makassar, Panakkukang, Panaikang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	18000 Paket	52.800.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1 05 01 1,06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	608.000	Kota Makassar, Panakkukang, Panaikang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Dokumen	24.200.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1 05 01 1,06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	10.875.000	Kota Makassar, Panakkukang, Panaikang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Laporan	17.250.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Targ et	Pagu Indikatif	
1	05	01	1,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan	378.025.000	Kota Makassar, Panakkukang, Panaikang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	100 Laporan	450.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	01	1,06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	5000 Dokume	12,145,400	Kota Makassar, Panakkukang, Panaikang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5000 Dokume	28,551,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	01	1,06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	50.000.000	Kota Makassar, Panakkukang, Panaikang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Dokumen	100.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	01	1,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			693.642.500				1.650.000.000	
1	05	01	1,07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	51.000.000	Kota Makassar, Panakkukang, Panaikang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Paket	200.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	01	1,07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	150.000.000	Kota Makassar, Panakkukang, Panaikang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Unit	100.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	01	1,07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	8 Unit	492.642.500	Kota Makassar, Panakkukang, Panaikang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8 Unit	700.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	01	1,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			19.352.367.648				19.107.832.528	
1	05	01	1,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	19.572.000	Kota Makassar, Panakkukang, Panaikang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Laporan	25.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Targ et	Pagu Indikatif	
1	05	01	1,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	19.332.795.648	Kota Makassar, Panakkukang, Panaikang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Laporan	19.082.832.528	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	01	1,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			460.976.000				675.000.000	
1	05	01	1,09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	25 Unit	331.980.000	Kota Makassar, Panakkukang, Panaikang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	25 Unit	375.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	01	1,09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 Unit	96.496.000	Kota Makassar, Panakkukang, Panaikang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	9 Unit	200.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	01	1,09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0 Unit 41 Unit	32.500.000	Kota Makassar, Panakkukang, Panaikang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0 Unit 41 Unit	100.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	02			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			4.406.894.750				5.154.000.000	
1	05	02	1,01		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi			3.468.369.700				3.764.000.000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif	
1	05	02	1,01	01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan dan Pengawasan	277 Kasus	413.044.350	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	277 Kasus	800.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	02	1,01	02	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	42 Kasus	2.201.000.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	42 Kasus	2.300.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	02	1,01	03	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	0 Dokumen 15 Dokumen	489.818.250	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0 Dokumen 15 Dokumen	500.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Targ et	Pagu Indikatif	
1 05 02 1,01 04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	0 Dokumen 50 Dokumen	74.709.250	Kota Makassar, Panakkukang, Panaikang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0 Dokumen 50 Dokumen	100.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1 05 02 1,01 05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	3840 Orang	273.981.350	Kota Makassar, Panakkukang, Panaikang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3840 Orang	10.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1 05 02 1,01 06	Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	5 Dokumen	5.731.500	Kota Makassar, Panakkukang, Panaikang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5 Dokumen	50.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1 05 02 1,01 07	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	150 Unit	10.085.000	Kota Makassar, Panakkukang, Panaikang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	150 Unit	4.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1 05 02 1,02	Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur			828.745.800				1.140.000.000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Targ et	Pagu Indikatif	
1 05 02 1,02 01	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	3 Laporan	297.142.900	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Laporan	320.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1 05 02 1,02 02	Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	65 Laporan	266.222.750	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	65 Laporan	420.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1 05 02 1,02 03	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Sesuai SOP	25 Laporan	265.380.150	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	25 Laporan	400.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1 05 02	1,03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi		109.779.250				250.000.000	
1 05 02 1,03 01	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda	25 Laporan	109.779.250	Kota Makassar, Panakkukang, Panaikang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	25 Laporan	250.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1 05 03		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA		715.712.200				940.000.000	
1 05 03	1,01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana		245.314.200				325.000.000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
			Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Targ et	Pagu Indikatif					
	Provinsi												
1	05	03	1,01	02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana)	Jumlah Orang yang Tersedia untuk Melaksanakan Sosialisasi KIE Rawan Bencana (Per Jenis Bencana) Lintas Kabupaten/Kota	80 Orang	245.314.200	Kota Makassar, Panakkukang, Panaikang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	80 Orang	325.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	03	1,02		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana		265.798.800					315.000.000	
1	05	03	1,02	02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Jumlah Aparatur Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Memperoleh Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	100 Orang	265.798.800	Kota Makassar, Panakkukang, Panaikang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	100 Orang	315.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	03	1,04		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana		204.599.200					300.000.000	
1	05	03	1,04	03	Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	2 Dokumen	204.599.200	Kota Makassar, Panakkukang, Panaikang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2 Dokumen	300.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	04			PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN			666.219.300				1.030.000.000	
1	05	04	1,01		Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran			573.580.050				780.000.000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif	
1	05	04	1,01	04	Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi Antar Daerah Berbatasan, Antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi Antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi Antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	0 Dokumen 12 Dokumen	205.581.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0 Dokumen 12 Dokumen	200.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Targ et	Pagu Indikatif	
1 05 04 1,01 09	Bimbingan Teknis Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah Aparatur Kebakaran yang Mengikuti Bimbingan Teknis Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota) Jumlah Aparatur Kebakaran yang Mengikuti Bimbingan Teknis Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota) Jumlah Pelatihan Dasar Pemadam Kebakaran	0 Orang 100 Orang 2 kali	367.999.050	Kota Makassar, Panakkukang, Panaikang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0 Orang 100 Orang 2 kali	500.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1 05 04 1,02	Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran			92.639.250				250.000.000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Targ et	Pagu Indikatif	
1	05	04	1,02	01	Pembinaan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	2 Laporan	92.639.250	Kota Makassar, Panakkukang, Panaikang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2 Laporan	250.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
TOTAL								48.079.541.072				53.258.709.169	

BAB V
P E N U T U P

Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2023 ini merupakan rencana kerja tahunan yang disusun berdasarkan masa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023.

Rencana Kerja ini juga merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023, sehingga Visi dan Misi Sulawesi Selatan serta target dan Sasaran Pembangunan yang dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2023 merupakan dokumen rencana operasional pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun 2023, guna mendukung pencapaian arah, tujuan, sasaran dan target prioritas rencana pembangunan jangka pendek tahun 2023.


Dalam rangka menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan tersebut sebagai upaya dalam mendukung capaian indikator kinerja maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Seluruh aparatur Satuan Polisi Pamong Praja berkewajiban untuk melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam Rencana Kerja 2023 dengan efektif dan efisien;
2. Rencana Kerja Tahun 2023 sebagai langkah awal dalam penyusunan Anggaran Tahun 2023 dimana Rencana Kerja di jabarkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran;
3. Untuk menjamin konsistensi, sinergitas, harmonisasi, integritas dan efisiensi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja seluruh aparatur secara berjenjang wajib melaksanakan pengawasan dan pengendalian;
4. Rencana Kerja Tahun 2023 mengacu pada Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tata cara penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Rencana Kerja Tahun 2023 berlaku sejak tanggal ditetapkan, adapun langkah-langkah persiapan dimulai sejak tanggal ditetapkan hingga pelaksanaannya perlu terus dilakukan dengan memperhatikan penerapan prinsip-prinsip koordinasi, sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi dan efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Demikian Dokumen Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 disusun dan dijadikan pedoman dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada tahun 2023.

Makassar, Juli 2022

PIL. KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI SULAWESI SELATAN,


ANTRI RIJAYA, S.STP
Pangkat Pembina Tk.I
NIP. 19751114 199511 1 001

LAMPIRAN

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
			Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Targ et	Pagu Indikatif					
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
1	05					48.079.541.072		53.258.709.169					
1	05	01				42.290.714.822		46.134.709.169					
1	05	01	1,01			434.358.300		540.878.600					
					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								
					Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
1	05	01	1,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	298.131.400	Kota Makassar, Panakkukang, Panaikang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2 Dokumen	400.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	01	1,01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	11.042.000	Kota Makassar, Panakkukang, Panaikang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Dokumen	15.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	01	1,01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	14.254.700	Kota Makassar, Panakkukang, Panaikang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Dokumen	63.343.100	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif	
1	05	01	1,01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	17.791.500	Kota Makassar, Panakkukang, Panaikang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Dokumen	15.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	01	1,01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	60.893.900	Kota Makassar, Panakkukang, Panaikang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Dokumen	11.565.250	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	01	1,01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	15.718.800	Kota Makassar, Panakkukang, Panaikang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Laporan	15.970.250	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	01	1,01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	16.526.000	Kota Makassar, Panakkukang, Panaikang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4 Laporan	20.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	01	1,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			20.632.500.474				23.065.647.041	
1	05	01	1,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1944 Orang/ Bulan	20.527.519.424	Kota Makassar, Panakkukang, Panaikang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1944 Orang/ Bulan	22.960.522.041	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif	
1	05	01	1,02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	57.921.300	Kota Makassar, Panakkukang, Panaikang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Dokumen	67.052.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	01	1,02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	13.399.000	Kota Makassar, Panakkukang, Panaikang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Laporan	5.107.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	01	1,02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	20 Dokumen	8.943.750	Kota Makassar, Panakkukang, Panaikang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	20 Dokumen	6.516.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	01	1,02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran S dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	24.717.000	Kota Makassar, Panakkukang, Panaikang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	18 Laporan	26.450.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	01	1,03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			9.498.750				22.000.000	
1	05	01	1,03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	5.442.750	Kota Makassar, Panakkukang, Panaikang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2 Dokumen	10.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	01	1,03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 Laporan	4.056.000	Kota Makassar, Panakkukang, Panaikang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Laporan	12.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	01	1,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			232.950.750				375.800.000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Targ et	Pagu Indikatif	
1 05 01 1,05 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	0 Paket 150 Paket	216.000.000	Kota Makassar, Panakkukang, Panaikang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0 Paket 150 Paket	305.800.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1 05 01 1,05 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah pelaksanaan penilaian Dupak Fungsional	340 Dokumen 2 kali	16.950.750	Kota Makassar, Panakkukang, Panaikang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	340 Dokumen 2 kali	70.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1 05 01 1,06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			474.420.400				697.551.000	
1 05 01 1,06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	50 Paket	4.135.000	Kota Makassar, Panakkukang, Panaikang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	50 Paket	7.500.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1 05 01 1,06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	250 Paket	3.307.000	Kota Makassar, Panakkukang, Panaikang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	250 Paket	17.250.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1 05 01 1,06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	18000 Paket	15.325.000	Kota Makassar, Panakkukang, Panaikang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	18000 Paket	52.800.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1 05 01 1,06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	608.000	Kota Makassar, Panakkukang, Panaikang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Dokumen	24.200.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1 05 01 1,06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	10.875.000	Kota Makassar, Panakkukang, Panaikang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Laporan	17.250.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Targ et	Pagu Indikatif	
1	05	01	1,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan	378.025.000	Kota Makassar, Panakkukang, Panaikang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	100 Laporan	450.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	01	1,06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	5000 Dokume	12,145,400	Kota Makassar, Panakkukang, Panaikang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5000 Dokume	28,551,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	01	1,06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	50.000.000	Kota Makassar, Panakkukang, Panaikang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Dokumen	100.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	01	1,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			693.642.500				1.650.000.000	
1	05	01	1,07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	51.000.000	Kota Makassar, Panakkukang, Panaikang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Paket	200.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	01	1,07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	150.000.000	Kota Makassar, Panakkukang, Panaikang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Unit	100.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	01	1,07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	8 Unit	492.642.500	Kota Makassar, Panakkukang, Panaikang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8 Unit	700.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	01	1,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			19.352.367.648				19.107.832.528	
1	05	01	1,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	19.572.000	Kota Makassar, Panakkukang, Panaikang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Laporan	25.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Targ et	Pagu Indikatif	
1	05	01	1,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	19.332.795.648	Kota Makassar, Panakkukang, Panaikang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Laporan	19.082.832.528	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	01	1,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			460.976.000				675.000.000	
1	05	01	1,09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	25 Unit	331.980.000	Kota Makassar, Panakkukang, Panaikang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	25 Unit	375.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	01	1,09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 Unit	96.496.000	Kota Makassar, Panakkukang, Panaikang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	9 Unit	200.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	01	1,09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0 Unit 41 Unit	32.500.000	Kota Makassar, Panakkukang, Panaikang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0 Unit 41 Unit	100.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	02			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			4.406.894.750				5.154.000.000	
1	05	02	1,01		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi			3.468.369.700				3.764.000.000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif	
1	05	02	1,01	01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan dan Pengawasan	277 Kasus	413.044.350	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	277 Kasus	800.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	02	1,01	02	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	42 Kasus	2.201.000.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	42 Kasus	2.300.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	02	1,01	03	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	0 Dokumen 15 Dokumen	489.818.250	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0 Dokumen 15 Dokumen	500.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Targ et	Pagu Indikatif	
1 05 02 1,01 04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	0 Dokumen 50 Dokumen	74.709.250	Kota Makassar, Panakkukang, Panaikang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0 Dokumen 50 Dokumen	100.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1 05 02 1,01 05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	3840 Orang	273.981.350	Kota Makassar, Panakkukang, Panaikang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3840 Orang	10.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1 05 02 1,01 06	Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	5 Dokumen	5.731.500	Kota Makassar, Panakkukang, Panaikang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5 Dokumen	50.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1 05 02 1,01 07	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	150 Unit	10.085.000	Kota Makassar, Panakkukang, Panaikang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	150 Unit	4.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1 05 02 1,02	Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur			828.745.800				1.140.000.000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif	
1	05	02	1,02	01	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	3 Laporan	297.142.900	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Laporan	320.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	02	1,02	02	Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	65 Laporan	266.222.750	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	65 Laporan	420.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	02	1,02	03	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Sesuai SOP	25 Laporan	265.380.150	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	25 Laporan	400.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	02	1,03		Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi			109.779.250				250.000.000	
1	05	02	1,03	01	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda	25 Laporan	109.779.250	Kota Makassar, Panakkukang, Panaikang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	25 Laporan	250.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	03			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA			715.712.200				940.000.000	
1	05	03	1,01		Pelayanan Informasi Rawan Bencana			245.314.200				325.000.000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
			Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Targ et	Pagu Indikatif					
	Provinsi												
1	05	03	1,01	02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana)	Jumlah Orang yang Tersedia untuk Melaksanakan Sosialisasi KIE Rawan Bencana (Per Jenis Bencana) Lintas Kabupaten/Kota	80 Orang	245.314.200	Kota Makassar, Panakkukang, Panaikang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	80 Orang	325.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	03	1,02		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana			265.798.800				315.000.000	
1	05	03	1,02	02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Jumlah Aparatur Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Memperoleh Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	100 Orang	265.798.800	Kota Makassar, Panakkukang, Panaikang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	100 Orang	315.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	03	1,04		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana			204.599.200				300.000.000	
1	05	03	1,04	03	Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	2 Dokumen	204.599.200	Kota Makassar, Panakkukang, Panaikang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2 Dokumen	300.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	04			PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN			666.219.300				1.030.000.000	
1	05	04	1,01		Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran			573.580.050				780.000.000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Targ et	Pagu Indikatif	
1	05	04	1,01	04	Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi Antar Daerah Berbatasan, Antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi Antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi Antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	0 Dokumen 12 Dokumen	205.581.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0 Dokumen 12 Dokumen	200.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Targ et	Pagu Indikatif	
1 05 04 1,01 09	Bimbingan Teknis Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah Aparatur Kebakaran yang Mengikuti Bimbingan Teknis Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota) Jumlah Aparatur Kebakaran yang Mengikuti Bimbingan Teknis Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota) Jumlah Pelatihan Dasar Pemadam Kebakaran	0 Orang 100 Orang 2 kali	367.999.050	Kota Makassar, Panakkukang, Panaikang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0 Orang 100 Orang 2 kali	500.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1 05 04 1,02	Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran			92.639.250				250.000.000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Targ et	Pagu Indikatif	
1	05	04	1,02	01	Pembinaan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	2 Laporan	92.639.250	Kota Makassar, Panakkukang, Panaikang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2 Laporan	250.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
TOTAL								48.079.541.072				53.258.709.169	